

Transformasi Partisipasi Politik Generasi Z di Era Digital: Media Sosial sebagai Arena Demokrasi Baru dalam Penguatan Demokrasi Partisipatif di Indonesia

Fauza Andriyadi^{1*}, Ramzi Murziqin², Agus Junaidi³, Septian Fatianda⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

³Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia

⁴Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia

Email Koresponden: fauza.andriyadi@ar-raniry.ac.id*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola partisipasi politik masyarakat, khususnya Generasi Z, melalui pemanfaatan media sosial sebagai ruang interaksi politik yang semakin terbuka dan dinamis. Media sosial tidak lagi berfungsi hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi arena demokrasi baru (*digital public sphere*) yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi politik, membangun opini publik, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik secara digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partisipasi politik Generasi Z di era digital dengan menempatkan media sosial sebagai arena demokrasi baru dalam penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber sekunder yang meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi yang relevan dengan media sosial, demokrasi digital, dan partisipasi politik Generasi Z. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui teknik *content analysis* dan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mensintesis berbagai temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial telah mentransformasi pola partisipasi politik Generasi Z dari bentuk konvensional menuju partisipasi politik digital yang lebih terbuka, interaktif, dan kolaboratif. Media sosial juga memperluas ruang demokrasi melalui peningkatan akses informasi, komunikasi politik, dan keterlibatan masyarakat dalam diskursus publik. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, polarisasi politik, *echo chamber*, dan kecenderungan *slacktivism* yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Artikel ini menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan demokrasi digital sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antara penggunaan media sosial dan kualitas partisipasi politik Generasi Z di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia memerlukan peningkatan literasi politik digital, etika bermedia sosial, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital untuk mewujudkan ruang publik digital yang sehat, inklusif, dan demokratis.

Kata kunci : Generasi Z; Media Sosial; Demokrasi Digital; Partisipasi Politik; Demokrasi Partisipatif



Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik demokrasi dan partisipasi politik. Kehadiran internet yang diikuti dengan pesatnya perkembangan media sosial telah mentransformasi pola komunikasi politik dari model konvensional menuju komunikasi politik digital yang lebih terbuka, interaktif, dan tanpa batas ruang maupun waktu (Castells, 2012). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi personal, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi politik, menyampaikan aspirasi, membentuk opini publik, serta melakukan mobilisasi politik secara cepat dan masif (Loader et al., 2014).

Perkembangan tersebut juga tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet Indonesia telah mencapai lebih dari 79% dari total populasi, yang menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, laporan DataReportal (We Are Social & Meltwater) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 139 juta pengguna media sosial aktif, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial mencapai lebih dari 3 jam per hari, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat aktivitas media sosial tertinggi di dunia (We Are Social, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran informasi, pembentukan opini publik, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Tingginya penetrasi internet menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok usia muda. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet berasal dari kelompok usia produktif yang aktif memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi, sarana komunikasi, dan ruang interaksi sosial tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi politik dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi (Nasrullah, 2017).

Dominasi pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia muda, khususnya Generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada rentang tahun 1997–2012. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya dalam mengakses informasi, membangun komunikasi, maupun berpartisipasi dalam aktivitas politik (Prasetyo et al., 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z lebih banyak memperoleh informasi politik melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube dibandingkan melalui media massa konvensional. Selain sebagai konsumen informasi, mereka juga berperan sebagai produsen konten yang aktif menyampaikan opini, membangun diskusi publik, serta menginisiasi berbagai bentuk kampanye sosial dan politik berbasis media digital (Nasrullah, 2017).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya transformasi pola partisipasi politik masyarakat. Jika sebelumnya partisipasi politik lebih identik dengan kegiatan seperti menghadiri kampanye, mengikuti rapat umum, bergabung dalam organisasi politik, atau memberikan suara dalam pemilihan umum, maka saat ini bentuk partisipasi politik berkembang ke dalam aktivitas digital, seperti menyebarkan informasi politik, membuat konten edukasi politik, mengikuti diskusi daring, menandatangani petisi elektronik, hingga melakukan kampanye digital melalui media sosial (Verba & Nie, 1972). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah memperluas bentuk partisipasi politik masyarakat sekaligus mengubah praktik demokrasi menuju model yang lebih terbuka dan partisipatif.

Meskipun demikian, perkembangan media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan terhadap kualitas demokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial berpotensi menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble*, memperkuat polarisasi politik, mempercepat

penyebaran disinformasi, *hoaks*, serta mendorong munculnya fenomena *slacktivism*, yaitu partisipasi politik yang berhenti pada aktivitas simbolik di media sosial tanpa diikuti keterlibatan nyata dalam proses demokrasi (Pariser, 2011; Morozov, 2011; Christensen, 2011). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana media sosial mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik Generasi Z atau justru menghasilkan bentuk partisipasi politik yang bersifat semu.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada hubungan antara penggunaan media sosial dengan tingkat partisipasi politik atau perilaku memilih dalam pemilihan umum. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada hubungan langsung antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik, serta belum banyak menjelaskan bagaimana demokrasi digital berperan sebagai mekanisme yang mentransformasikan budaya politik Generasi Z melalui pemanfaatan media sosial sebagai arena demokrasi baru. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan sintesis konseptual dengan menempatkan media sosial sebagai arena demokrasi baru (*digital public sphere*), sementara demokrasi digital diposisikan sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antara penggunaan media sosial dan kualitas partisipasi politik Generasi Z di Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partisipasi politik Generasi Z di era digital serta implikasinya terhadap penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi partisipasi politik Generasi Z di era digital melalui media sosial sebagai arena demokrasi baru dalam penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan konsep, teori, serta

berbagai temuan empiris yang telah dipublikasikan sehingga menghasilkan sintesis ilmiah yang komprehensif mengenai hubungan antara media sosial, demokrasi digital, dan partisipasi politik Generasi Z (Zed, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, *prosiding*, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, publikasi resmi lembaga negara, serta sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dengan tema media sosial, demokrasi digital, partisipasi politik, Generasi Z, dan demokrasi partisipatif (Sugiyono, 2023). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kredibilitas, otoritas, dan keterbaruan sumber. Penelitian ini mengutamakan penggunaan literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir, tanpa mengesampingkan karya-karya klasik yang menjadi landasan konseptual dan teoritis penelitian, seperti teori *Public Sphere*, *Political Participation*, serta konsep *Digital Democracy*. Selain itu, literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari artikel jurnal yang telah melalui proses *peer review*, sehingga kualitas, validitas, dan kredibilitas informasi yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, mengevaluasi, serta mengelompokkan berbagai referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023; Zed, 2018). Seluruh literatur kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, yaitu transformasi media sosial, demokrasi digital, partisipasi politik Generasi Z, serta penguatan demokrasi partisipatif. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai perkembangan kajian, mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, serta menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dalam penyusunan sintesis konseptual (Zed, 2018).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*) (Krippendorff, 2019; Braun & Clarke, 2021). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, sintesis temuan penelitian, dan

penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Pada tahap reduksi data, berbagai informasi yang diperoleh dari literatur diseleksi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama untuk mengidentifikasi pola hubungan antarkonsep, persamaan, maupun perbedaan hasil penelitian terdahulu. Tahap berikutnya dilakukan melalui sintesis konseptual dengan mengaitkan berbagai temuan penelitian pada Teori *Public Sphere* dari Jürgen Habermas, Teori *Political Participation* dari Verba dan Nie, serta konsep *Digital Democracy* dan *Digital Citizenship*. Melalui tahapan tersebut diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media sosial telah bertransformasi menjadi arena demokrasi baru yang memengaruhi pola partisipasi politik Generasi Z di Indonesia.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan, mengkaji, dan mengonfirmasi berbagai artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang relevan (Sugiyono, 2023). Validitas data diperkuat melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, sintesis temuan penelitian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis sehingga menghasilkan interpretasi yang objektif, komprehensif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2023).

Pembahasan/Hasil

A. Transformasi Partisipasi Politik Generasi Z di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar pola partisipasi politik masyarakat, khususnya Generasi Z. Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan media sosial sebagai ruang komunikasi politik, penyebaran informasi, pembentukan opini publik, serta mobilisasi partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi digital (Nasrullah, 2017). Perubahan ini menunjukkan bahwa aktivitas politik tidak lagi bergantung pada ruang-ruang konvensional, tetapi telah bergeser ke ruang digital yang memungkinkan interaksi politik berlangsung secara lebih cepat, terbuka, dan partisipatif (Habermas, 1989; Papacharissi, 2015). Media sosial tidak lagi diposisikan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi

telah berkembang menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, diskusi publik, dan proses pembentukan opini politik (Budiardjo, 2019).

Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi digital sehingga memiliki karakteristik sebagai *digital natives*. Kedekatan mereka dengan teknologi informasi menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, pendidikan, maupun politik (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2024; Badan Pusat Statistik, 2025). Tingginya penetrasi internet di Indonesia turut memperkuat kecenderungan Generasi Z memanfaatkan media sosial sebagai sumber utama informasi dan sarana membangun jejaring sosial maupun politik (APJII, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa platform seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memfasilitasi penyebaran informasi politik, komunikasi antara masyarakat dengan aktor politik, serta pembentukan opini publik (Ramadhan et al., 2024; APJII, 2024). Melalui platform tersebut, Generasi Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten yang aktif menyampaikan aspirasi, mengikuti kampanye digital, mengkritisi kebijakan publik, hingga membangun gerakan sosial berbasis media digital (Hermanto, 2023).

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian terdahulu, transformasi partisipasi politik Generasi Z tidak lagi diukur semata-mata melalui keterlibatan dalam pemilihan umum ataupun keanggotaan organisasi politik formal, tetapi juga melalui aktivitas digital seperti menciptakan konten politik, mengikuti diskusi daring, menandatangani petisi elektronik, menggalang dukungan melalui media sosial, serta menyebarkan informasi mengenai kebijakan publik (Budiardjo, 2019). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah memperluas bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi modern. Dengan demikian, partisipasi politik Generasi Z tidak hanya mencerminkan perubahan media komunikasi, tetapi juga menandai lahirnya budaya politik digital yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis jejaring (Castells, 2012; Papacharissi, 2015).

B. Media Sosial sebagai Arena Demokrasi Baru

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah membentuk paradigma baru dalam praktik demokrasi kontemporer. Konsep ruang publik (*public sphere*) yang sebelumnya didominasi oleh media massa konvensional dan forum tatap muka mengalami transformasi menjadi ruang digital yang lebih terbuka, partisipatif, interaktif, dan tanpa batas geografis. Dalam perspektif *Public Sphere* yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, ruang publik merupakan arena komunikasi yang memungkinkan masyarakat berdialog secara rasional dalam membentuk opini publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial memperluas fungsi ruang publik tersebut dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi produsen sekaligus konsumen informasi politik sehingga proses komunikasi politik berlangsung secara lebih demokratis dan inklusif (Papacharissi, 2015; Nasrullah, 2017).

Media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, maupun tokoh publik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Interaksi tersebut tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi politik, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Budiardjo, 2019; Nasrullah, 2017). Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam memperluas komunikasi politik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, serta mendorong terbentuknya ruang demokrasi digital yang lebih partisipatif (APJII, 2024; Prasetyo et al., 2024).

Penelitian Hidayat dan Anisti (2023) menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan intensitas komunikasi politik generasi muda di Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh Prasetyo et al., (2024) yang menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik alternatif bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan sintesis kedua penelitian tersebut, bahwa media sosial merupakan arena demokrasi baru yang mampu memperkuat partisipasi

politik masyarakat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat literasi digital pengguna.

Namun demikian, berbagai literatur juga menunjukkan bahwa perkembangan media sosial menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, disinformasi politik, polarisasi sosial, *filter bubble*, dan fenomena *echo chamber* berpotensi menurunkan kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus diiringi dengan penguatan literasi digital, etika komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi (Snyder, 2019).

C. Demokrasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa demokrasi digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik Generasi Z. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, proses perumusan kebijakan publik, serta berbagai bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Kemudahan akses tersebut mendorong meningkatnya kesadaran politik, memperluas ruang diskusi publik, serta memperkuat keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui berbagai platform digital (Sadat, 2025).

Demokrasi digital tidak hanya memperluas akses informasi politik, tetapi juga menciptakan pola komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan kritik, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, serta terlibat secara langsung dalam berbagai forum diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nasrullah, 2017).

Di sisi lain, media sosial juga berperan sebagai sarana pendidikan politik yang efektif bagi Generasi Z. Berbagai informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara, tahapan penyelenggaraan pemilu, kebijakan publik, serta isu-isu nasional dapat diakses secara cepat melalui berbagai platform digital. Kemudahan tersebut mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, adaptif, dan memiliki kesadaran politik yang lebih baik. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai media edukasi politik yang berkontribusi terhadap pembentukan budaya demokrasi yang partisipatif (Budiardjo, 2019).

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa demokrasi digital merupakan jembatan yang menghubungkan perkembangan teknologi informasi dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, khususnya Generasi Z. Namun demikian, efektivitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, melainkan juga oleh tingkat literasi politik digital, kemampuan berpikir kritis masyarakat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ruang digital yang sehat, inklusif, dan bebas dari disinformasi (Prasetyo et al., 2024).

D. Tantangan Demokrasi Digital bagi Generasi Z

Meskipun demokrasi digital memberikan berbagai manfaat dalam memperluas partisipasi politik masyarakat, hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Tingginya arus informasi yang beredar melalui berbagai platform digital tidak selalu diikuti dengan kualitas informasi yang baik. Penyebaran berita bohong (*hoaks*), disinformasi, propaganda politik, ujaran kebencian, serta meningkatnya polarisasi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Kondisi tersebut berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara rasional (Padoma et al., 2024).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa algoritma media sosial berpotensi membentuk *filter bubble* dan *echo chamber*, yaitu kondisi ketika pengguna lebih banyak menerima informasi yang sejalan dengan pandangan

politiknya dan cenderung menghindari informasi yang berbeda. Fenomena tersebut dapat memperkuat polarisasi politik, mengurangi kualitas dialog publik, serta menghambat terbentuknya ruang diskusi yang inklusif dalam kehidupan demokrasi digital (Ramadhani et al., 2024).

Di sisi lain, hasil telaah berbagai penelitian juga mengidentifikasi munculnya fenomena *slacktivism*, yaitu bentuk partisipasi politik yang hanya berhenti pada aktivitas simbolik, seperti memberikan tanda suka (*like*), membagikan (*share*), atau mengomentari konten politik tanpa diikuti keterlibatan nyata dalam proses demokrasi. Meskipun aktivitas tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap isu-isu politik, partisipasi yang bersifat simbolik belum tentu menghasilkan perubahan sosial maupun pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik (Prasetyo et al., 2024).

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, penguatan demokrasi digital tidak cukup hanya melalui penyediaan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi digital, literasi politik, kemampuan berpikir kritis, serta penguatan etika bermedia sosial. Upaya tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan ruang publik digital yang sehat, inklusif, demokratis, dan mampu mendorong partisipasi politik yang berkualitas (Manuel, 2013).

E. Implikasi terhadap Penguatan Demokrasi Partisipatif di Indonesia

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, media sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia apabila didukung oleh peningkatan literasi politik digital, penguatan regulasi terhadap penyebaran disinformasi, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, dan penyedia platform digital (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan demokrasi digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi informasi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat

dalam memanfaatkan ruang digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab (Prasetyo et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, partisipasi politik Generasi Z perlu diarahkan tidak hanya pada aktivitas digital yang bersifat simbolik, seperti memberikan tanda suka (*like*), membagikan (*share*), atau mengomentari konten politik, tetapi juga pada keterlibatan yang lebih substantif dalam proses demokrasi (Budiardjo, 2019). Bentuk partisipasi tersebut meliputi keterlibatan dalam penyusunan kebijakan publik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi dalam forum konsultasi publik, serta kontribusi aktif dalam berbagai gerakan sosial yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan demokrasi yang inklusif (Kurniawan et al., 2024).

Secara konseptual, hasil sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena demokrasi baru (*digital public sphere*) yang mengintegrasikan akses informasi, komunikasi politik, pembentukan opini publik, dan partisipasi warga negara dalam satu ekosistem demokrasi digital. Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada hubungan langsung antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik, artikel ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi digital merupakan faktor yang menentukan efektivitas media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi Z (Yulida et al., 2024). Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran demokrasi, penguatan kesadaran politik, dan transformasi budaya politik masyarakat menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif (Saputra et al., 2025).

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan demokrasi partisipatif di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh tingginya intensitas penggunaan media sosial, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, inklusif, dan bebas dari disinformasi. Oleh karena itu, penguatan literasi politik digital, pengembangan etika bermedia sosial, serta penyusunan kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi strategi yang sangat penting untuk memastikan bahwa media sosial benar-

benar berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik Generasi Z di Indonesia (Nabilah et al., 2026).

Kesimpulan

Penelitian sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah mentransformasi pola partisipasi politik Generasi Z di Indonesia dari bentuk partisipasi politik konvensional menuju partisipasi politik digital yang lebih terbuka, interaktif, dan berbasis teknologi informasi. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi arena demokrasi baru (*digital public sphere*) yang memungkinkan Generasi Z memperoleh informasi politik, membangun opini publik, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas politik di ruang digital. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah memperluas ruang partisipasi politik sekaligus mengubah budaya politik masyarakat menuju praktik demokrasi yang lebih partisipatif.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap peningkatan partisipasi politik Generasi Z tidak berlangsung secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh kualitas demokrasi digital yang ditandai dengan keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, transparansi komunikasi publik, serta meningkatnya literasi politik digital masyarakat. Dengan demikian, demokrasi digital berperan sebagai mekanisme yang memperkuat hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas partisipasi politik Generasi Z.

Di sisi lain, sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya kualitas partisipasi politik. Fenomena *slacktivism*, penyebaran disinformasi, polarisasi politik, echo chamber, serta rendahnya kemampuan literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi digital yang sehat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik digital perlu diimbangi dengan penguatan literasi politik digital, etika bermedia sosial, kemampuan berpikir kritis, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, organisasi

masyarakat sipil, dan penyedia platform digital untuk menciptakan ruang publik digital yang inklusif, aman, dan demokratis.

Secara konseptual, artikel ini menawarkan sintesis bahwa media sosial merupakan arena demokrasi baru yang tidak hanya memengaruhi tingkat partisipasi politik, tetapi juga mentransformasi budaya politik Generasi Z melalui penguatan demokrasi digital. Temuan ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara media sosial, demokrasi digital, dan partisipasi politik dengan menempatkan demokrasi digital sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh media sosial terhadap kualitas partisipasi politik Generasi Z. Selain memberikan kontribusi akademik, temuan ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta pengelola platform media sosial dalam merumuskan strategi penguatan partisipasi politik digital yang lebih berkualitas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model konseptual dengan memasukkan variabel lain, seperti literasi politik digital, kepercayaan politik, efektivitas algoritma media sosial, dan kualitas tata kelola platform digital guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik Generasi Z di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Malden USA: Polity Press.
- Christensen, H.S. (2011), Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means? *Peer-reviewed Journals on the Internet*, 16(2), 1-13. <https://doi.org/10.5210/fm.v16i2.3336>
- Habermas, J. (1993). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: The MIT Press

- Hermanto, B. (2023), Dinamika Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Legislasi Yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Kurniawan, W., Arham, M., & Muluk, H. (2024), Social Media's Influence on Political Participation: Insights from a Systematic Review and Meta-Analysis in Indonesian Psychology. *Jurnal Psikologi: Indonesian Journal of Psychology*, 51(3), 336-355. <https://doi.org/10.22146/jpsi.101469>
- Loader, B.D., Vromen, A., & Xenos, M.A. (2014), The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>
- Manuel, C. (2013), Networks of outrage and hope - social movements in the Internet age. *International Journal of Public Opinion Research*, 25(3), 398-402. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edt020>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion, the Dark Side of Internet Freedom*. USA: Public Affairs.
- Nabilah, E.R., Putri, F.S., Sahira, N.A.P., Fatkhuri, F., & Reja, R. (2026), Media Sosial Sebagai Arena E-Partisipasi: Studi Kasus Ekspresi Tuntutan Publik 17+8. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISoH)*, 2(2), 1950-1958. <https://doi.org/10.63822/7mdaz445>
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Jakarta: Kencana.
- Padoma, O. & Rahmawati, D.E. (2024), Analyzing Social Media Usage and Political Participation Among First-Time Voters in Indonesia's 2024 Election. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 14(2), 170-187. <https://doi.org/10.15642/jrp.2024.14.2.170-187>
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford University Press.
- Pariser. (2011). *The Filter Bubble*. New York: The Penguin Press
- Prasetyo, H.L., Ahmad, S., Lutfi, A. (2024), Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak

- Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225–237.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>
- Ramadhani, S., Putra, D.E., Salam, R.I., & Pratama, R. (2024), Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Update Data Menara pada DISKOMINFO Solok Selatan. *Jurnal Pustaka AI*, 4(1), 17-21.
<https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v4i1.783>
- Sadat, A. (2025), Digital governance and civic inclusion to enhance public participation in political decision-making processes. *Political Participation*, 7(12), 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1671373>
- Saputra, A. Oktavia, F.N., Permatasari, D., Salsabila, P.D., & Ulfa, K. (2026), Systematic Literatur Riview: Krisis Politik Dan Polarisasi Masyarakat Di Era Media Sosial. *Jurnal Media Akademik*, 4(6), 1-13.
<https://doi.org/10.62281/pn1yv990>
- Snyder, H. (2019), Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(2019), 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta.
- Verba, S., & Nie, N.H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. University of Chicago Press.
- Yulida, D., & Tarigan, V.C.E. (2024), Digital Democracy in Indonesia: Challenges and Opportunities for Generation Z Political Participation. *KNAPHTN (Desember)*, 2(1), 157-180.
<https://doi.org/10.55292/xcb0cb160>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.